

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta;
- Limbong, Benhard, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta;
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta;
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Munsyarief, 2013, *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Cetakan I, CV. Ombak, Yogyakarta;
- Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Tim, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta;
- Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria Indonesia; Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Radjawali Press, Jakarta;
- Poerwokusumo, Soedarisman, 1985, *Kasultanan Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- , 1985, *Kadipaten Pakualaman*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media group, Jakarta;
- Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Putra A Bardin, Bandung;

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta;

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung;

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XXI, PT Intermasa, Jakarta;

Sudiyat, Iman, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta;

Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### **B. Jurnall/Skripsi-Tesis-Disertasi**

Sukisno, Djoko, “Kedudukan Kaultanan Yogyakarta Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Setelah Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Ringkasan Disertasi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Suhartono, “Pengelolaan Tanah Kaultanan (Sultan Grond) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keisitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis*, Progam Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Parlindungan, Moses, “Landasan Hukum Pembudidayaan Udang Berkaitan Dengan Penguasaan Kawasan Pesisir di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Ramadhan, Vito Ninggar, “Pemberian Perizinan Penguasaan Tanah Kasultanan Untuk Usaha Pariwisata Di Kawasan Pesisir Pantai Sundak Kabupaten Gunung Kidul, DIY”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2015.

Wibowo, Danang Ari, “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pakai Atas Sultan Grond Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Kusumoharyono, Umar, *Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*, Artikel, Yustisia Edisi Nomor 68 Mei-Agustus 2006.

Rusdiana, Sa'ida dan Rimawati, *Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Magersari Pada Masyarakat Di Kecamatan Danurejan Yogyakarta*, Penelitian Lintas Bagian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

*Rijksblad* (Lembaran Negara) Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan *Rijksblad* Pakualaman Tahun 1918 Nomor 18 Bab *Wewenang Bumi*, Bab *Amaringake wewenang Panggaduhe Bumi Sarta Wewenang Panganggo Bumi*;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956, Nomor 3.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Urusan Keisitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Sempadan. Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2009  
Nomor 1 Seri E.

#### **D. Internet**

Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta,  
[http://www.pendidikandiy.go.id/dinas\\_v4/?view=baca\\_isi\\_lengkap&id\\_p1](http://www.pendidikandiy.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p1)  
diakses tanggal 22 Januari 2016.

Media Pembinaan Hukum Nasional, “Interaksi Hukum Lokal dan Hukum  
Nasional dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta,”  
<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%204%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf> diakses tanggal 19 Oktober 2016.

<http://digilib.unila.ac.id/11009/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 20  
November 2016.